

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Stewardship Theory

Stewardship theory ditemukan oleh James H. Davis pada tahun 1991. *Stewardship theory* sama seperti *agency* teori yaitu hubungan dua pihak yakni prinsipal (pemilik) dan *steward* (manajer). Bedanya dengan agen, manajer bertindak berdasarkan kepentingan pemilik. Berdasarkan kepentingan pemilik atau perusahaan, manajer harus meyakini bahwa dengan bekerja guna kemajuan perusahaan maka kebutuhan pribadinya akan terpenuhi dan mereka akan termotivasi untuk berperilaku sesuai kepentingan perusahaan. Maka dari itu, *steward* harus dapat memuaskan kepentingan pemegang saham (pemilik) guna memaksimalkan kinerja organisasi. Asumsi teori manajemen mengatakan bahwa manajer akan berperilaku bermanfaat secara sosial, berarti mereka akan mengikuti keinginan prinsipal atau perusahaan. Kinerja perusahaan, meliputi pertumbuhan pendapatan atau keuntungan yang maksimal merupakan *outcome* yang diinginkan dari sudut pandang manajer. Terdapat dampak positif terhadap kinerja karena kedua belah pihak, baik prinsipal maupun manajer bekerja untuk mencapai tujuan yang sama, hal tersebut yang dikemukakan oleh teori manajemen.³³

Faktor psikologis dan situasional menjadi dasar perilaku manajer. Faktor psikologis, seperti motivasi intrinsik, penghargaan yang tinggi dan kekuatan pribadi akan menentukan perilaku seorang manajer.³⁴ Motivasi intrinsik ada di dalam individu dan memberikan kepuasan dalam dan dari dirinya sendiri, ini adalah atribut psikologis dari teori *stewardship* karena *steward* (manajer) termotivasi oleh *high order reward* yang tidak berwujud. Individu yang memiliki tingkat identifikasi tinggi dengan organisasi mereka lebih cenderung memilih *stewardship* karena mereka merasakan rasa keanggotaan yang kuat dengan organisasi mereka. Teori *stewardship* menerapkan perspektif kekuatan pribadi, menggambarkan kekuatan berdasarkan

³³ Imam Ghozali, *25 Teori Besar (Grand Theory) Ilmu Manajemen, Akuntansi dan Bisnis* (Semarang: Yoga Pratama, n.d.).

³⁴ J.H. Davis, F.D. Schoorman, and R. Donaldson, "Toward a Stewardship Theory of Management," *Academy of Management Review* 22, no. 1 (1997): 20–47.

hubungan interpersonal yang berkembang seiring waktu, yang pada gilirannya mempengaruhi dan memberdayakan manajer *steward* (pelayan).³⁵ Faktor-faktor psikologis ini memudahkan pemilihan *stewardship*, yang pada akhirnya berdampak positif pada kinerja perusahaan.

Struktur organisasi dan mencakup filosofi dan budaya manajemen merupakan gambaran dari faktor situasional. Teori menunjukkan bahwa berorientasi pada keterlibatan, *collectivist*, budaya *low power distance* membantu memengaruhi pilihan teori *stewardship*. Filosofi manajemen berorientasi keterlibatan digambarkan oleh lingkungan dimana karyawan dipercayai dengan tantangan, peluang, dan tanggung jawab. Dalam organisasi yang dilambangkan dengan kolektivisme, individu menempatkan tujuan kolektif di atas tujuan pribadi individu, penekanannya adalah pada memiliki, mengidentifikasi, dan menampilkan kesetiaan karena kerangka kerja sosial yang ada dalam organisasi. Budaya *low power distance* menggambarkan lingkungan di mana kesetaraan dirasakan antara berbagai tingkat hierarki organisasi.³⁶ Struktur organisasi yang mengakomodasi dan mempengaruhi pilihan perilaku *stewardship* membantu memfasilitasi kinerja maksimum bagi perusahaan.

Asumsi dasar teori manajemen didasarkan pada model kemanusiaan yang humanistik karena landasannya pada sosiologi dan psikologi. Model ini mengasumsikan bahwa individu dimotivasi oleh kepuasan kebutuhan tingkat yang lebih tinggi. Dalam hubungan pemilik dan manajer, seorang manajer akan mendahulukan kepentingan prinsipal di atas kepentingan diri sendiri. Prinsipal akan menciptakan struktur organisasi di mana perilaku manajemen ini dapat berkembang. Dengan demikian, struktur *stewardship* dilihat sebagai kolektivistik dan kooperatif, menghasilkan manfaat positif bagi organisasi.³⁷

2. Transparansi

Istilah “transparansi” menggambarkan sebuah organisasi yang terbuka dan jujur mengenai cara mereka mengambil keputusan dan membagikan informasi penting tentang organisasinya.³⁸ Menurut Andrianto, transparansi bersifat global

³⁵ Davis, Schoorman, and Donaldson.

³⁶ Davis, Schoorman, and Donaldson.

³⁷ Ghozali, *25 Teori Besar (Grand Theory) Ilmu Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*.

³⁸ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Terbaru (Andi, 2018).

dalam proses pengelolaan sumber daya publik yang memungkinkan seluruh lapisan masyarakat berpartisipasi aktif.³⁹ Serta menurut Hafiz, keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat itulah yang dimaksud ketika berbicara tentang transparansi. Hal tersebut menyakini bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mengetahui bagaimana pemerintah menangani uang yang telah diberikan dan apakah pemerintah mengikuti aturan yang ditetapkan dalam undang-undang atau tidak.⁴⁰ Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan keterbukaan pengelola dimana dalam hal ini takmir masjid terhadap masyarakat dalam mengakses informasi secara keseluruhan serta dapat mempertanggung jawabkan kebenaran sumber daya yang dititipkan oleh masyarakat kepada pengurus masjid berdasarkan peraturan yang berlaku dimana dalam hal ini Al-Qur'an dan Al-Hadits.⁴¹

Transparansi merupakan bentuk keterbukaan yang membuat informasi terkait kegiatan pengelolaan sumber daya publik tersedia bagi pihak-pihak yang memerlukan informasi tersebut.⁴² Transparansi mengacu pada kewajiban manajer untuk menerapkan prinsip keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan komunikasi informasi. Transparansi berarti bahwa informasi yang dikomunikasikan kepada semua pengguna yang berkepentingan harus lengkap, benar, dan tepat waktu tanpa kerahasiaan, penyembunyian, penutupan atau pengungkapan yang tertunda.^{43,44} Prinsip yang menjamin setiap orang mempunyai kesempatan atau kebebasan mengakses informasi

³⁹ Andrianto N., *Good E-Governance : Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Governance* (Malang: Banyumedia Publishing, 2007).

⁴⁰ Abdul Hafiz Tanjung, *Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik* (Yogyakarta: BPFE UGM, 2000).

⁴¹ Ismet Ismatullah and Tina Kartini, "Transparansi dan Akuntabilitas Dana Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat," 2018.

⁴² Novita Alaika Sari, Ana Sopannah, and Dwi Anggarani, "Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Pada Masjid Sabilillah di Kota Malang Berdasarkan ISAK 35," *Journal of Public and Business Accounting* 3, no. 1 (June 18, 2022): 22–33, <https://doi.org/10.31328/jopba.v3i1.278>.

⁴³ Susi Haryanti and M Elfan Kaubab, "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Masjid di Wonosobo (Studi Empiris Pada Masjid Yang Terdaftar di Kemenag Kabupaten Wonosobo Tahun 2019)" 1, no. 1 (2019).

⁴⁴ Elok Oktavia Widhawati, Dwi Suhartini, and Astrini Aning Widoretno, "Akuntabilitas dan Transparansi Sebagai Implementasi ISAK 35," n.d.

tentang pengelolaan dana masjid adalah informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan dan hasil yang dicapai. Prinsip ini menekankan pada dua aspek, yaitu komunikasi publik yang dilakukan pemerintah dan akses terhadap informasi sebagai hak publik.⁴⁵

Menurut Krina, ada beberapa parameter transparansi, antara lain memberikan informasi tanggung jawab yang jelas, membentuk mekanisme pengaduan terhadap pelanggaran peraturan atau permintaan suap, kemudahan akses informasi, dan peningkatan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.⁴⁶ Terdapat beberapa indikator transparansi,⁴⁷ meliputi:

a. Adanya kesediaan dan aksesibilitas dokumen

Ketersediaan aksesibilitas dokumen seperti dokumen pencatatan laporan arus kas, buku realisasi anggaran dana masjid, serta laporan keuangan setiap tahun.

b. Adanya keterbukaan proses

Keterbukaan dan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi tentang rincian anggaran dana masjid dan juga hasil dari pembangunan masjid.

c. Adanya kejelasan dan kelengkapan informasi

Kejelasan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi secara lengkap mengenai pengelolaan dana masjid yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan, seperti pemberdayaan masyarakat serta pembangunan sarana dan prasarana masjid.

Organisasi pemerintahan Humanitarian Forum Indonesia (HFI) juga telah menetapkan beberapa prinsip transparansi, antara lain adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat (sumber pendanaan, pelaksanaan kegiatan, bentuk bantuan), kehadiran media dan kegiatan yang berkaitan dengan pembiayaan atau kegiatan keuangan dan detail yang relevan dengan publikasi, terdapat laporan keuangan secara berkala mengenai penggunaan sumber pendanaan untuk kegiatan yang telah atau sedang berlangsung, dan terdapat organisasi,

⁴⁵ Krina P., *Indikator Dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi* (Jakarta: Sekretariat Good Publik Governance, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003).

⁴⁶ Krina P.

⁴⁷ Alan Pusida, Joyce J Rares, And Rully Mambo, "Transparansi Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud," no. 108 (n.d.).

aturan atau pedoman penyebaran informasi dalam laporan tahunan yang dihasilkan oleh organisasi, website atau media yang diterbitkan.⁴⁸

Pada perspektif Islam, organisasi yang transparan adalah organisasi yang menyediakan semua catatan keuangannya dan informasi lain tentang pengelolaan keuangan (termasuk uang infaq) kepada semua orang yang mempunyai kepentingan sah terhadap organisasi tersebut. Segala hal yang berkaitan dengan informasi harus diungkapkan secara jujur dan komprehensif.⁴⁹ Transparansi penyelenggaraan pelayanan publik terutamanya,⁵⁰ meliputi:

a) Pengelolaan dan penyampaian layanan publik

Seluruh aspek penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk perumusan, persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan atau pengendalian, harus terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا
أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S Al-Baqarah: 267)

⁴⁸ Julkarnain, “Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Meningkatkan Kualitas Sistem Manajemen Keuangan Masjid Di Kota Medan,” *Urnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)* 5, no. 2 (September 2018).

⁴⁹ Abdussalam Mahmoud Abu-Tapanjeh, “Corporate Governance from the Islamic Perspective: A Comparative Analysis with OECD Principles,” *Critical Perspectives on Accounting* 20, no. 5 (July 2009): 556–67, <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2007.12.004>.

⁵⁰ Ismatullah and Kartini, “Transparansi dan Akuntabilitas Dana Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat.”

b) Prosedur pelayanan

Proses pelayanan adalah seperangkat prosedur kerja yang saling berhubungan yang menguraikan langkah-langkah dan teknik yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu layanan. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT berikut ini:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۗ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمَ

Artinya : “Berkata Yusuf: Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir), sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan.” (Q.S Yusuf: 55)

c) Persyaratan layanan teknis dan manajemen

Masyarakat harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemberi layanan agar dapat memperoleh pelayanan. Bentuk persyaratannya harus seminimal mungkin dan dikaji agar sesuai dengan jenis pelayanan yang akan diberikan, baik teknis maupun administratif.

d) Rincian biaya pelayanan

Biaya pelayanan berarti segala rincian biaya dengan nama atau sebutan apapun sebagai imbalan atas pemberian pelayanan umum yang besaran dan tata cara pembayarannya ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e) Waktu penyelesaian pelayanan

Waktu penyelesaian pelayanan adalah jangka waktu sejak selesainya pelayanan publik atau terpenuhinya persyaratan teknis dan persyaratan manajemen sampai dengan selesainya proses pelayanan.

f) Orang yang berwenang atau bertanggung jawab

Petugas yang berwenang atau bertanggung jawab berarti seseorang yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menangani suatu proses pelayanan publik, menyelesaikan keluhan, serta menciptakan citra yang baik terhadap penerima pelayanan.

g) Lokasi pelayanan

Lokasi pelayanan adalah tempat yang digunakan untuk memberikan pelayanan publik, dimana tempat atau lokasinya diusahakan harus tetap, tidak berpindah-pindah, mudah dijangkau oleh pemohon pelayanan, serta dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai.

h) Janji pelayanan

Janji pelayanan harus tertulis, singkat, jelas, mudah dimengerti, menyangkut hal-hal yang esensial dan informasi yang akurat, termasuk di dalamnya mengenai standar kualitas jasa.

i) Standar pelayanan jasa

Standar pelayanan jasa adalah suatu ukuran kualitas kinerja yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan.

j) Informasi pelayanan

Setiap unit pelayanan wajib mempublikasikan mengenai prosedur, persyaratan, biaya, waktu, standar, akta/janji, motto pelayanan, lokasi serta petugas yang berwenang dan bertanggung jawab guna memenuhi kebutuhan informasi pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT berikut ini:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
الْأَنسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S An-Nisa: 58)

3. Akuntabilitas

Vance, Lowry, dan Eggett menjelaskan teori akuntabilitas, yaitu bagaimana persepsi kebutuhan untuk membenarkan tindakan seseorang kepada pihak lain menyebabkan seseorang mempertimbangkan dan merasa bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan dan proses penilaian. Pada gilirannya, kebutuhan yang dirasakan untuk mempertimbangkan proses dan hasil pengambilan keputusan meningkatkan kemungkinan seseorang akan berpikir secara mendalam dan sistematis tentang perilaku proseduralnya. Teori ini awalnya dikemukakan oleh

Tetlock, Lerner, dan rekannya dan telah digunakan secara efektif dalam penelitian organisasi.⁵¹

Seperti yang dijelaskan dengan cerdas oleh Vance, Lowry, dan Eggett, cara yang berguna untuk memahami akuntabilitas adalah dengan membedakan antara dua kegunaan paling umum, sebagai kebijakan dan sebagai mekanisme. Sebagai suatu kebijakan, akuntabilitas dipandang sebagai kualitas di mana seseorang menunjukkan kesediaan untuk menerima tanggung jawab, suatu sifat yang diinginkan dalam diri pejabat publik, lembaga pemerintah, atau perusahaan. Oleh karena itu, dalam penggunaan ini, akuntabilitas merupakan fitur positif dari suatu entitas. Sebagai suatu mekanisme, akuntabilitas dipandang sebagai suatu proses di mana seseorang mempunyai kewajiban potensial untuk menjelaskan tindakannya kepada pihak lain yang mempunyai hak untuk memberikan penilaian atas tindakannya serta membebaskan orang tersebut pada konsekuensi yang mungkin terjadi terhadap tindakannya. Teori akuntabilitas berfokus pada proses akuntabilitas.⁵²

Teori akuntabilitas mengajukan beberapa mekanisme yang meningkatkan persepsi akuntabilitas. Misalnya, “manipulasi akuntabilitas yang paling sederhana pun tentu melibatkan beberapa submanipulasi yang dapat dibedakan secara empiris” yang dikemukakan oleh Lerner dan Tetlock, termasuk kehadiran orang lain, identifikasi, dan ekspektasi evaluasi.⁵³ Penelitian terbaru menunjukkan bahwa artefak sistem desain IT dapat memanipulasi empat komponen inti teori akuntabilitas dan dengan demikian meningkatkan perasaan akuntabilitas karyawan terhadap keamanan sistem organisasi tanpa intervensi atau

⁵¹ Anthony Vance, Paul Benjamin Lowry, and Dennis Eggett, *A New Approach to The Problem of Access Policy Violations: Increasing Perceptions of Accountability Through The User Interface*, vol. 39 (2) (MIS Quarterly (MISQ), 2015).

⁵² Anthony Vance, Paul Benjamin Lowry, and Dennis Eggett, *Using Accountability To Reduce Access Policy Violations In Information Systems*, vol. 29 (4) (Journal of Management Information Systems (JMIS), 2013), <http://dx.doi.org/10.2753/MIS0742-1222290410>.

⁵³ Lerner J.S. and Tetlock P.E., *Accounting for the Effects of Accountability*, vol. 125 (2) (Psychological Bulletin, 1999).

pelatihan yang mengganggu, diantaranya identifikasi, ekspektasi evaluasi, kesadaran akan pemantauan, dan kehadiran sosial.^{54,55}

- a. Identifikasi adalah pengetahuan seseorang bahwa keluarannya dapat dikaitkan dengan dirinya dan dengan demikian mengungkapkan identitas aslinya.⁵⁶
- b. Harapan terhadap evaluasi adalah keyakinan bahwa kinerja seseorang akan dinilai oleh pihak lain berdasarkan aturan dasar normatif dan dengan konsekuensi yang tersirat.⁵⁷
- c. Kesadaran akan pemantauan adalah keadaan kognisi aktif pengguna bahwa pekerjaan terkait sistemnya dipantau.⁵⁸
- d. Kehadiran sosial adalah kesadaran pengguna lain dalam sistem.⁵⁹

Akuntabilitas sendiri berasal dari istilah dalam bahasa Inggris yakni *accountability* yang berarti pertanggung jawaban. Akuntabilitas merupakan sebuah pengungkapan aktivitas yang ditanggung dengan memiliki kewenangan serta hak guna permintaan pertanggung jawaban serta dilaksanakan secara periodik.⁶⁰ Akuntabilitas menurut Suherman adalah menggerakkan seluruh komponen kegiatan perusahaan agar berjalan sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya masing-masing.⁶¹ Akuntabilitas digunakan untuk mengukur sejauh mana proses pemberian layanan kepada pemangku kepentingan.⁶² Konsep *accountability* berbeda dengan konsep *responsibility*. Menurut hipotesis *Clash of Jurisdictional*, salah satu

⁵⁴ Vance, Lowry, and Eggett, *Using Accountability To Reduce Access Policy Violations In Information Systems*.

⁵⁵ Vance, Lowry, and Eggett, *A New Approach to The Problem of Access Policy Violations: Increasing Perceptions of Accountability Through The User Interface*.

⁵⁶ David Eargle, Anthony Vance, and Paul Benjamin Lowry, "Personal How Moral Intensity and Impulsivity Moderate the Influence of Accountability on Access Policy Violations in Information Systems," 2013, <https://doi.org/10.13140/2.1.3754.4644>.

⁵⁷ J.S. and P.E., *Accounting for the Effects of Accountability*.

⁵⁸ Vance, Lowry, and Eggett, *A New Approach to The Problem of Access Policy Violations: Increasing Perceptions of Accountability Through The User Interface*.

⁵⁹ Vance, Lowry, and Eggett.

⁶⁰ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*.

⁶¹ Ismatullah and Kartini, "Transparansi dan Akuntabilitas Dana Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat."

⁶² Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005).

alasan utama mengapa beberapa profesi dipandang lebih profesional dibandingkan yang lain adalah karena tingkat keahlian mereka tidak diterima secara universal. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan sistem praktik dan nilai antar profesi, dan setiap orang ingin menunjukkan bahwa dirinya ahli dan benar-benar menguasai bidang keahliannya dibandingkan dengan orang lain.⁶³

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pengelolaan masjid merupakan sebuah bentuk tanggung jawab pengelola masjid terhadap segala hal yang berkaitan dengan arus kas masjid yang mana pengelola masjid diberi wewenang dan memastikan bahwa segala kegiatan yang dilakukan dapat dimaknai, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan seluruh kegiatannya. Oleh karena itu, masjid harus mempunyai sistem yang ada sehingga dapat menunjang terlaksananya kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik atau masyarakat. Sebagai prinsipnya, akuntabilitas adalah cara untuk menilai seberapa baik penyampaian layanan sejalan dengan nilai dan standar pihak-pihak yang berkepentingan dalam layanan tersebut. Akuntabilitas sendiri terdiri dari dua jenis yakni akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal merupakan bentuk pertanggung jawaban kepada Tuhan, sedangkan akuntabilitas horizontal merupakan bentuk tanggung jawab hubungan organisasi sebagai pemangku kepentingan dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya.⁶⁴

Terdapat beberapa perangkat parameter akuntabilitas, antara lain adanya keselarasan antara implementasi dengan standar prosedur pelaksanaan yang berlaku, berlakunya sanksi sesuai ketentuan, apabila terjadi kelalaian atau kesalahan dalam proses kegiatan, serta menghasilkan *outcome* (manfaat/dampak) atau *output* (hasil) yang terukur.⁶⁵ Berikut ini beberapa indikator dari akuntabilitas, meliputi:

- a. Akuntabilitas proses, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas apakah sudah cukup baik.

⁶³ Simanjuntak and Januarsi, *Akuntabilitas Dan Pengelolaan Keuangan Di Masjid*.

⁶⁴ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*.

⁶⁵ Widhawati, Suhartini, and Widoretno, "Akuntabilitas dan Transparansi Sebagai Implementasi ISAK 35."

- b. Prinsip pertanggung jawaban, yaitu prinsip dasar suatu organisasi sebagai bentuk kewajiban jabatan dalam memberikan pertanggung jawaban laporan kegiatan kepada atasannya.
- c. Adanya perencanaan serta kesesuaian antara pelaksanaan dengan prosedur, yaitu suatu organisasi memiliki sebuah perencanaan penggunaan dana dan apabila dilakukan monitoring dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai prosedur dan perencanaan penggunaan dana).

Akuntabilitas dibagi menjadi dua fase tergantung pada tahapan rencana,⁶⁶ yakni:

- a) Tahap proses pengambilan keputusan

Akuntabilitas publik dipastikan pada berbagai titik dalam proses pengambilan keputusan dengan menggunakan indikator-indikator berikut:

 - Setiap kali ada anggota masyarakat yang meminta suatu keputusan, keputusan tersebut harus disampaikan secara tertulis.
 - Prinsip-prinsip dan nilai-nilai etika, serta prinsip-prinsip administratif dan norma-norma sosial yang benar, dipertimbangkan ketika mengambil keputusan.
 - Kebijakan yang diadopsi mempunyai tujuan yang jelas dan sejalan dengan tujuan organisasi serta persyaratan yang relevan.
 - Terdapat mekanisme untuk memastikan bahwa standar dipenuhi, dan jika standar tersebut tidak dipenuhi terdapat konsekuensi terhadap akuntabilitas.
 - Konsistensi dan kelayakan tujuan operasional yang telah ditetapkan serta prioritas pencapaiannya.
- b) Tahap sosialisasi kebijakan

Beberapa langkah yang dilakukan dalam sosialisasi kebijakan untuk menjamin akuntabilitas publik, seperti:

 - Penyebaran informasi yang relevan dengan keputusan melalui saluran komunikasi pribadi dan massa.
 - Kebenaran dan kelengkapan data yang berkaitan dengan cara untuk mencapai tujuan program.

⁶⁶ Ismatullah and Kartini, “Transparansi dan Akuntabilitas Dana Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat.”

- Prosedur pengaduan masyarakat akan dibentuk, dan masyarakat akan dapat memperoleh informasi mengenai keputusan yang telah diambil.
- Akses terhadap sistem informasi manajemen pemerintah pelacakan hasilnya.

4. Kompetensi Pengurus Masjid

Kompetensi adalah seperangkat karakteristik dan keterampilan yang dapat dibuktikan yang memungkinkan dan meningkatkan efisiensi atau kinerja suatu pekerjaan. Kompetensi merupakan serangkaian pengetahuan, kemampuan, keterampilan, pengalaman dan perilaku, yang mengarah pada kinerja efektif dalam aktivitas individu. Kompetensi bersifat terukur dan dapat dikembangkan melalui pelatihan. Beberapa ahli melihat kompetensi sebagai kombinasi pengetahuan praktis dan teoritis, keterampilan kognitif, perilaku, dan nilai-nilai yang digunakan untuk meningkatkan kinerja, atau sebagai keadaan atau kualitas yang memiliki kualifikasi yang memadai atau baik, memiliki kemampuan untuk melakukan peran tertentu. Misalnya, kompetensi manajemen mungkin mencakup pemikiran sistem dan kecerdasan emosional, serta keterampilan dalam mempengaruhi dan bernegosiasi.⁶⁷

Keahlian dan profesionalisme sumber daya manusia ternyata sangat penting bagi setiap perusahaan. Memiliki kemampuan berpikir, bertindak, dan mengambil kesimpulan yang dapat diterapkan dan dipelihara pada suatu waktu merupakan sifat mendasar yang dimiliki setiap manusia.⁶⁸ Ada tiga indikator utama dalam kompetensi,⁶⁹ yakni:

a) *Knowledge* (Pengetahuan)

Ketika seseorang memiliki informasi yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya di sektor atau bidang keahliannya, dapat dikatakan bahwa mereka memiliki pengetahuan. Peningkatan efisiensi organisasi dapat dilihat dari sukses dan tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada takmir yang

⁶⁷ "Competence (Human Resources)," in *Wikipedia*, September 20, 2023, [https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Competence_\(human_resources\)&oldid=1176290383](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Competence_(human_resources)&oldid=1176290383).

⁶⁸ Moeherson, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*, Revisi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).

⁶⁹ Parulian Hutapea and Nurianna Thoha, *Kompetensi Plus : Teori, Desain, Kasus, dan Penerapan Untuk HR dan Organisasi Yang Dinamis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

memiliki pengetahuan cukup. Namun jika takmir tidak memiliki pengetahuan yang cukup, maka pekerjaannya akan terhenti.

b) *Skill* (Keterampilan)

Seorang takmir adalah ikhtiarnya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya.

c) *Attitude* (Sikap)

Ketika seorang takmir memiliki sifat-sifat yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi, maka dengan sendirinya ia akan berusaha lebih keras dalam menyelesaikan semua tugas yang diberikan kepadanya. Sebab, sikap merupakan cara bertindak seseorang ketika melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan organisasi.

Kinerja erat kaitannya dengan kompetensi, baik kinerja individu maupun kinerja organisasi.⁷⁰ Pekerja yang kompeten adalah pekerja yang dapat melakukan pekerjaannya dengan baik, mempelajari hal-hal baru dengan cepat, beradaptasi dengan berbagai kondisi, dan meningkatkan keuntungan yang telah disepakati bagi pemberi kerja.⁷¹ Pada prinsipnya merupakan kewajiban mendasar setiap Muslim untuk memastikan keberhasilan finansial masjid. Membangun, merenovasi, menempati, mengisi, merevitalisasi, mengabdikan, mengapresiasi, dan melestarikan masjid merupakan bagian dari kemakmurannya.⁷² Berikut ini adalah salah satu firman-Nya Allah SWT yang menunjukkan keutamaan bagi pemakmur masjid, Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى
الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ۗ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

Artinya : “Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari

⁷⁰ Basyirah Ainun, Andriani, and Nurhidayati, “Standar Pelaporan Dana Masjid : PSAK 45 VS PSAK,” 2018.

⁷¹ Ratna Wijayanti and Nur Handayani, “Pengaruh Kompetensi SDM dan Implementasi Akuntansi Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah” 6 (2017).

⁷² Suparman Mannuhung and Andi Mattingaragau Tenrigau, “Manajemen Pengelolaan Masjid dan Remaja Masjid di Kota Palopo,” *To Maega | Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (August 31, 2018): 14, <https://doi.org/10.35914/tomaega.v1i1.69>.

kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Q.S At-Taubah: 18)

Pengelolaan masjid saat ini memerlukan pengetahuan dan keterampilan manajemen, dan pengelola masjid harus mampu beradaptasi dengan perkembangan saat ini. Alat bantu yang dibutuhkan dalam manajemen masjid modern adalah metode/pendekatan, perencanaan, strategi dan model evaluasi. Waktu telah berlalu ketika para manajer dapat mengatasi kurangnya perencanaan, pembagian tugas, dan pelaporan akuntabilitas keuangan dengan hanya mengandalkan sistem manajemen tradisional.⁷³ Dalam hal menghasilkan laporan keuangan, tingkat pendidikan takmir masjid menjadi pertanda baik akan kemampuannya. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi berarti takmir mempunyai pengetahuan yang lebih banyak dan dapat memberikan laporan yang lebih baik.⁷⁴

Tingkat pendidikan seseorang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengetahuan dan pemahaman akuntansinya. Oleh karena itu, untuk menghasilkan laporan yang berkualitas, seorang takmir masjid, khususnya penanggung jawab administrasi dalam peran bendahara masjid, harus memiliki gelar Sarjana Akuntansi atau Sekolah Kejuruan Akuntansi.⁷⁵ Pengelolaan keuangan, penulisan laporan, dan mengikuti seminar merupakan cara yang bisa dilakukan takmir masjid untuk mengasah kemampuannya dalam mengawasi pundi-pundi masjid. Takmir masjid saat ini perlu mengetahui cara memanfaatkan teknologi secara efektif, khususnya dalam pembuatan *financial reports*.⁷⁶

⁷³ Mannuhung and Tenrigau.

⁷⁴ Puriyanti and Mukhibad, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Masjid.”

⁷⁵ Ade Imam Muslim and Ledian Sufina, “Pengaruh Latar Belakang Pendidikan dan Pemahaman Standar Akuntansi Keuangan Entitas Nirlaba terhadap Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan,” *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi* 3, no. 2 (July 30, 2018), <https://doi.org/10.25134/jrka.v4i1.1338>.

⁷⁶ Najmudin and Bayinah, “Kompetensi Takmir Dalam Menjaga Kualitas Laporan Keuangan Masjid.”

5. Kualitas Laporan Keuangan Masjid

Financial reports merinci aset moneter, kewajiban, keuntungan, dan kerugian suatu organisasi selama periode akuntansi tertentu.⁷⁷ Laporan akuntansi merupakan sinopsis seluruh uang yang berpindah tangan dalam suatu periode akuntansi tertentu.⁷⁸ Ketika pembaca laporan keuangan mampu memahami dan memanfaatkan isi laporan sebagai landasan pengambilan keputusan, sesuai dengan tingkat keahlian dan pemahamannya, maka informasi laporan tersebut dikatakan berkualitas tinggi.⁷⁹

Karakter kualitatif adalah fitur penting dari setiap laporan keuangan yang memungkinkan laporan tersebut mencapai tujuan yang dimaksudkan bagi semua pembaca. Laporan keuangan di Indonesia harus memenuhi standar tertentu yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Indikator-indikator ini menyatakan bahwa laporan harus dapat dibandingkan, relevan, dapat dipahami, dan dapat diandalkan.^{80,81,82}

a) Dapat dimengerti

Pentingnya kualitas informasi yang ada di dalam laporan keuangan merupakan cara untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Pengguna diharapkan memiliki pemahaman yang memadai tentang akuntansi, ekonomi, dan operasi komersial, serta disposisi yang baik dalam mempelajari materi.

b) Relevan

Agar laporan keuangan dianggap relevan, informasi yang disertakan harus dapat membantu pengguna menilai peristiwa masa lalu atau saat ini, membuat prediksi tentang

⁷⁷ Lawrence J. Gitman, *Principles of Managerial Finance*, 12th ed. (New York: Pearson Prentice Hall, 2009).

⁷⁸ Zaki Baridwan, *Intermediate Accounting*, Kedelapan (Yogyakarta: BPFE, 2008).

⁷⁹ Filasti Rahma, "Analisis Karakteristik Kualitatif Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan Kaitannya Dengan Kualitas Laporan Keuangan Daerah di Kota Bau-Bau" 8 (2020).

⁸⁰ Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan, PSAK No 1: Penyajian Laporan Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2009).

⁸¹ Sindy Andika Putri, Zul Azmi, and Mizan Asnawi, "Apakah Informasi Akuntansi Berdasarkan ISAK 35 Diperlukan Untuk Kualitas Laporan Keuangan Masjid?" 2, no. 1 (2022).

⁸² Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Keuangan Akuntansi Syariah* (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah, 2018).

masa depan, serta mengkonfirmasi atau memperbaiki hasil evaluasi sebelumnya.

c) Dapat diandalkan

Jika informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akurat, bebas dari kesalahan substansial atau penafsiran yang menyesatkan, dan dapat dikonfirmasi secara independen, maka kami dapat mengatakan bahwa informasi tersebut dapat diandalkan. Memanfaatkan informasi yang sifat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan, meskipun penting dapat menghasilkan kesimpulan yang salah.

d) Sebanding

Jika laporan keuangan dianggap dapat diperbandingkan, pembaca harus diberi informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan untuk menyusunnya, serta perubahan apa pun terhadap kebijakan tersebut dan pengaruhnya terhadap laporan. Praktik akuntansi yang digunakan berbagai organisasi untuk mencatat transaksi dan kejadian lainnya mungkin berbeda dari satu periode ke periode berikutnya, yang mungkin dapat dilihat oleh pengguna.

B. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa kajian mengenai topik kualitas laporan keuangan masjid dan aspek-aspek terkaitnya telah mencakup sejumlah kajian, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul	Hasil Penelitian
1.	Ismet Ismatullah dan Tina Kartini (2018)	Transparansi dan Akuntabilitas Dana Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat ⁸³	Transparansi tidak berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi umat, sedangkan akuntabilitas berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi umat. Serta pemberdayaan ekonomi

⁸³ Ismatullah and Kartini, “Transparansi dan Akuntabilitas Dana Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat.”

			umat dipengaruhi oleh keterbukaan dan tanggung jawab.
<p>Persamaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Jenis penelitiannya yakni kuantitatif Data yang digunakan data primer berupa angket Pengolahan data menggunakan program SPSS <p>Perbedaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Populasi dalam penelitian ini yakni masjid-masjid yang ada di Kabupaten Kudus. Sedangkan populasi dalam penelitian Ismet Ismatullah dan Tina Kartini yakni para siswa. Variabel dependen dalam penelitian ini yakni kualitas laporan keuangan masjid. Sedangkan pada penelitian Ismet Ismatullah dan Tina Kartini variabel dependennya yakni pemberdayaan ekonomi umat. 			
2.	Syamsu Alam dan Roslina Alam (2019)	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Butuh Komitmen dan Kompetensi Pengelola ⁸⁴	Akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid secara parsial dipengaruhi positif dan signifikan oleh komitmen organisasi dan kompetensi pengelolaan keuangan. Sedangkan, akuntabilitas pengelolaan keuangan secara simultan dipengaruhi signifikan oleh kompetensi pengelola keuangan dan komitmen organisasi.
<p>Persamaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Jenis penelitiannya yakni kuantitatif Data yang digunakan data primer berupa kuisioner Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda <p>Perbedaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Populasi dalam penelitian ini yakni masjid-masjid yang ada di Kabupaten Kudus. Sedangkan populasi dalam penelitian Syamsu 			

⁸⁴ Alam and Alam, “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Butuh Komitmen dan Kompetensi Pengelola.”

<p>Alam dan Roslina Alam yakni masjid-masjid yang ada di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar.</p> <p>b. Variabel dependen dalam penelitian ini yakni kualitas laporan keuangan masjid. Sedangkan pada penelitian Syamsu Alam dan Roslina Alam variabel dependennya yakni akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid.</p>			
3.	<p>Agustina Isviandari, Nur Diana, dan M. Cholid Mawardi (2019)</p>	<p>Pengaruh Penerapan PSAK 45 Tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba, Penerapan PSAK 109, Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Masjid-Masjid di Kota Batu⁸⁵</p>	<p>Penerapan PSAK 45 dan penerapan PSAK 109 tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan masjid-masjid di Kota Batu, sedangkan pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan masjid-masjid di Kota Batu.</p>
<p>Persamaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jenis penelitiannya yakni kuantitatif b. Data yang digunakan data primer berupa kuisioner c. Variabel dependennya yakni kualitas laporan keuangan masjid <p>Perbedaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penelitian ini menggunakan tidak menggunakan pedoman PSAK 45. Sedangkan penelitian Agustina Isviandari, Nur Diana, dan M. Cholid Mawardi menggunakan pedoman PSAK 45. b. Populasi dalam penelitian ini yakni masjid-masjid yang ada di Kabupaten Kudus. Sedangkan populasi dalam penelitian Agustina Isviandari, Nur Diana, dan M. Cholid Mawardi yakni masjid-masjid yang ada di Kota Batu. 			

⁸⁵ Agustina Isviandari, Nur Diana, and M. Cholid Mawardi, "Pengaruh Penerapan PSAK 45 Tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba, Penerapan PSAK 109, Pengendalian Internal Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Masjid-Masjid Di Kota Batu," *E-JRA* 08, no. 01 (February 1, 2019).

4.	Tri Puriyanti dan Hasan Mukhibad (2020)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Masjid ⁸⁶	Kualitas laporan keuangan masjid dipengaruhi secara positif oleh kompetensi SDM dan sistem pengendalian internal, namun tidak dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, komitmen organisasi tidak mampu memitigasi dampak ketiga faktor tersebut terhadap kualitas laporan keuangan masjid.
<p>Persamaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jenis penelitiannya yakni kuantitatif b. Data yang digunakan data primer berupa kuisioner c. Variabel dependennya yakni kualitas laporan keuangan masjid <p>Perbedaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Populasi dalam penelitian ini yakni masjid-masjid yang ada di Kabupaten Kudus. Sedangkan populasi dalam penelitian Tri Puriyanti dan Hasan Mukhibad yakni masjid-masjid yang ada di Kota Surakarta. b. Teknis analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Sedangkan dalam penelitian Tri Puriyanti dan Hasan Mukhibad menggunakan teknik analisis <i>Structural Equation Modelling-Partial Least Square</i> (SEM-PLS). 			
5.	Asrori, Kiswanto, Fachrurrozie, dan Muhammad Ihlashul Amal (2020)	<i>Development of Mosque Accounting Information Systems Based on Non-Profit Entity Reporting Standards and Sharia</i>	Masjid Agung X menjalankan sistem informasi akuntansi dengan baik sesuai dengan standar pelaporan organisasi nirlaba. Namun, sistem informasi akuntansi di Masjid Agung X

⁸⁶ Puriyanti and Mukhibad, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Masjid.”

		<i>Compliance: A Case Study at The X Great Mosque</i> ⁸⁷	sebagai bagian dari akuntansi syariah belum sepenuhnya memenuhi kepatuhan syariah karena belum memisahkan dalam pencatatan dan pelaporan dana yang dibatasi dan tidak dibatasi.
<p>Persamaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Fokus penelitian yakni sistem informasi akuntansi masjid Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara observasi Data yang digunakan yakni data sekunder berupa laporan keuangan masjid <p>Perbedaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Jenis penelitian ini yakni kuantitatif. Sedangkan jenis penelitian Asrori, Kiswanto, Fachrurrozie, dan Muhammad Ihlashul Amal yakni kualitatif. Objek dalam penelitian ini yakni masjid-masjid yang ada di Kabupaten Kudus. Sedangkan objek dalam penelitian Asrori, Kiswanto, Fachrurrozie, dan Muhammad Ihlashul Amal yakni Masjid Agung X di Provinsi Jawa Tengah. 			
6.	Fuad Najmudin dan Ai Nur Bayinah (2022)	Kompetensi Takmir Dalam Menjaga Kualitas Laporan Keuangan Masjid: Telaah Literatur ⁸⁸	Menjaga integritas pelaporan keuangan masjid merupakan tanggung jawab krusial takmir. Takmir masjid dapat menunjukkan kepada para pemangku kepentingan bahwa mereka transparan dan akuntabel dengan memberikan laporan keuangan kepada mereka. Perbaikan yang dapat dilakukan takmir

⁸⁷ Asrori et al., “Development of Mosque Accounting Information Systems Based on Non-Profit Entity Reporting Standards and Sharia Compliance.”

⁸⁸ Najmudin and Bayinah, “Kompetensi Takmir Dalam Menjaga Kualitas Laporan Keuangan Masjid.”

			<p>masjid untuk memastikan laporan keuangannya tetap berkualitas tinggi, antara lain dengan melatih staf agar lebih kompeten dalam hal sumber daya manusia, membangun sistem pengendalian internal dan pengelolaan keuangan, meluncurkan kampanye penggalangan dana, dan memanfaatkan teknologi dengan baik.</p>
<p>Persamaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Data yang digunakan yakni data sekunder Fokus penelitian yakni untuk mengetahui kompetensi takmir dalam menjaga kualitas laporan keuangan <p>Perbedaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Jenis penelitian ini yakni kuantitatif. Sedangkan jenis penelitian Fuad Najmudin dan Ai Nur Bayinah yakni kualitatif dengan metode telaah literatur. Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data sekunder berupa laporan keuangan. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian Fuad Najmudin dan Ai Nur Bayinah yakni data sekunder berupa artikel jurnal pada penelitian terdahulu yang relevan. 			
7.	<p>Nabiilah Ayu Nirmala Pinaremas dan Ec. Muslimin (2022)</p>	<p>Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Masjid Aulia Rohman Tuban Terhadap Tingkat Kepercayaan Jamaah⁸⁹</p>	<p>Transparansi keuangan masjid berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan jamaah. Serta akuntabilitas keuangan masjid berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan jamaah.</p>
<p>Persamaan :</p>			

⁸⁹ Pinaremas and Muslimin, “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Masjid Aulia Rohman Tuban Terhadap Tingkat Kepercayaan Jamaah.”

<p>a. Jenis penelitiannya yakni kuantitatif</p> <p>b. Data yang digunakan yakni data primer berupa kuisioner</p> <p>c. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara observasi</p> <p>Perbedaan :</p> <p>a. Variabel dependen dalam penelitian ini yakni kualitas laporan keuangan masjid. Sedangkan pada penelitian Nabiilah Ayu Nirmala Pinaremas dan Ec. Muslimin varibel dependennya yakni tingkat kepercayaan jamaah.</p> <p>b. Objek dalam penelitian ini yakni masjid-masjid yang ada di Kabupaten Kudus. Sedangkan objek dalam penelitian Nabiilah Ayu Nirmala Pinaremas dan Ec. Muslimin yakni Masjid Aulia Rohman Tuban.</p>			
8.	Karyn Tri Juniaswati dan Isnan Murdiansyah (2022)	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Sabilillah Kota Malang Berdasarkan ISAK 35 ⁹⁰	Masjid Sabilillah Kota Malang sudah menerapkan indikator akuntabilitas tetapi belum akuntabel karena laporan keuangan Masjid Sabilillah Kota Malang belum menerapkan ISAK 35. Sedangkan transparansi belum diterapkan secara sepenuhnya karena belum memenuhi UU No. 28 Tahun 2004.
<p>Persamaan :</p> <p>a. Data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder</p> <p>b. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara observasi</p> <p>c. Fokus penelitian yakni untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan masjid</p> <p>Perbedaan :</p> <p>a. Jenis penelitian ini yakni kuantitatif. Sedangkan jenis penelitian Karyn Tri Juniaswati dan Isnan Murdiansyah yakni kualitatif.</p> <p>b. Objek dalam penelitian ini yakni masjid-masjid yang ada di Kabupaten Kudus. Sedangkan objek dalam penelitian Karyn Tri Juniaswati dan Isnan Murdiansyah yakni Masjid Sabilillah Kota Malang.</p>			

⁹⁰ Juniaswati and Murdiansyah, “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Sabilillah Kota Malang Berdasarkan ISAK 35.”

9.	Novita Alaika Sari, Ana Sopanah, dan Dwi Anggarani (2022)	Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Pada Masjid Sabilillah di Kota Malang Berdasarkan ISAK 35 ⁹¹	Masjid Sabilillah telah menerapkan beberapa bentuk akuntabilitas dan juga transparansi, mulai dari bentuk perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggung jawaban keuangan sudah dilakukan secara terbuka dihadapan para jamaah dan juga pimpinan. Namun terkait dengan laporan keuangan yang dibuat masih belum berpedoman pada ISAK 35 dan masih mengacu pada standar yang lama.
<p>Persamaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Teknik pengambilan data diperoleh dengan cara observasi Fokus penelitian yakni untuk mengetahui bentuk akuntabilitas dan transparansi yang diterapkan di masjid <p>Perbedaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Jenis penelitian ini yakni kuantitatif. Sedangkan jenis penelitian Novita Alaika Sari, Ana Sopanah, dan Dwi Anggarani yakni kualitatif. Objek dalam penelitian ini yakni masjid-masjid yang ada di Kabupaten Kudus. Sedangkan objek dalam penelitian Novita Alaika Sari, Ana Sopanah, dan Dwi Anggarani yakni Masjid Sabilillah Malang. 			
10.	Hajar Karimah dan Ahmad Baehaqi (2022)	Akuntabilitas dan Transparansi Manajemen Keuangan Masjid Agung Al Barkah Kota Bekasi ⁹²	Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak masjid atas setiap dana yang masuk telah melalui proses perencanaan,

⁹¹ Sari, Sopanah, and Anggarani, “Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Pada Masjid Sabilillah di Kota Malang Berdasarkan ISAK 35.”

⁹² Hajar Karimah and Ahmad Baehaqi, “Akuntabilitas Dan Transparansi Manajemen Keuangan Masjid Agung Al Barkah Kota Bekasi” 7, no. 1 (2022).

			<p>pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan oleh pihak pengurus masjid dan badan pengelola serta masyarakat. Serta praktik keterbukaan pengurus masjid kepada masyarakat dilakukan dengan memberikan informasi dana yang masuk dan keluar dalam jangka waktu tertentu serta menginfokan setiap kegiatan yang dilakukan menggunakan dana dari masyarakat.</p>
<p>Persamaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Data yang digunakan yakni data primer Fokus penelitian yakni akuntabilitas dan transparansi Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara observasi <p>Perbedaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Jenis penelitian ini yakni kuantitatif. Sedangkan jenis penelitian Hajar Karimah dan Ahmad Baehaqi yakni kualitatif deskriptif. Objek dalam penelitian ini yakni masjid-masjid yang ada di Kabupaten Kudus. Sedangkan Objek dalam penelitian Hajar Karimah dan Ahmad Baehaqi yakni Masjid Agung Al Barkah Kota Bekasi. 			
11.	Fitri Alzzahra Saechu dan Nurhayati (2023)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Laporan Keuangan Masjid Berdasarkan ISAK 35 ⁹³	Tekanan eksternal tidak berpengaruh secara signifikan, komitmen manajemen berpengaruh positif signifikan dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) tidak berpengaruh secara

⁹³ Fitri Alzzahra Saechu and Nurhayati, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Laporan Keuangan Masjid Berdasarkan ISAK 35," *Bandung Conference Series: Accountancy* 3, no. 1 (January 31, 2023), <https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.6441>.

			signifikan terhadap transparansi laporan keuangan masjid berdasarkan ISAK 35.
<p>Persamaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Jenis penelitiannya yakni kuantitatif Data yang digunakan yakni data primer berupa kuisioner Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda <p>Perbedaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Variabel dependen dalam penelitian ini yakni kualitas laporan keuangan masjid. Sedangkan pada penelitian Fitri Alzzahra Saechu dan Nurhayati varibel dependennya yakni transparansi laporan keuangan masjid berdasarkan ISAK 35. Objek dalam penelitian ini yakni masjid-masjid yang ada di Kabupaten Kudus. Sedangkan Objek dalam penelitian Fitri Alzzahra Saechu dan Nurhayati yakni Masjid Baiturrahman, Kabupaten Bandung. 			
12.	Umi Munawaroh dan Miftahul Huda (2023)	Peran Takmir Dalam Pengelolaan Keuangan Masjid Al Ma'ruf Samarinda ⁹⁴	Peran takmir Masjid Al Ma'ruf Samarinda dalam usaha penggalangan dana yaitu telah melaksanakan penggalangan melalui jamaah dan infaq pada sholat jum'at, zakat, dan donatur tetap. Adapun strategi takmir Masjid Al Ma'ruf Samarinda dalam usaha menggalang dana kepada donatur tetap ialah dengan pelayanan yang disediakan di antaranya adalah pelayanan kebersihan, pengurus yang ramah, dan pencerahan melalui pengajian rutin.

⁹⁴ Umi Munawaroh and Miftahul Huda, "Peran Takmir dalam Pengelolaan Keuangan Masjid Al Ma'ruf Samarinda" 2, no. 3 (2023).

			Pemanfaatan dana Masjid Al Ma'ruf Samarinda dilihat dari kebutuhan internal dan kebutuhan eksternal.
<p>Persamaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Fokus penelitian yakni kompetensi takmir masjid Data yang digunakan yakni data primer Teknik pengambilan data diperoleh dengan cara observasi <p>Perbedaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Jenis penelitian ini yakni kuantitatif. Sedangkan jenis penelitian Umi Munawaroh dan Miftahul Huda yakni kualitatif. Objek dalam penelitian ini yakni masjid-masjid yang ada di Kabupaten Kudus. Sedangkan Objek dalam penelitian Umi Munawaroh dan Miftahul Huda yakni Masjid Al-Ma'ruf Samarinda. 			
13.	Anisa Syafitri, Elyanti Rosmanidar, dan Marissa Putriana (2023)	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid Muhajirin (Studi Pada Masjid Muhajirin Desa Pelangki Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin) ⁹⁵	Akuntabilitas dan Transparansi pada Masjid Muhajirin ini sudah bertanggungjawab dan Transparan dalam pengelolaan keuangannya. Pada pengelolaan keuangannya masih sederhana dan belum menerapkan PSAK 45.
<p>Persamaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Teknik pengambilan data diperoleh dengan cara observasi Fokus penelitian yakni akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan masjid <p>Perbedaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Jenis penelitian ini yakni kuantitatif. Sedangkan jenis penelitian Anisa Syafitri, Elyanti Rosmanidar, dan Marissa Putriana yakni kualitatif. 			

⁹⁵ Anisa Syafitri, Elyanti Rosmanidar, and Marissa Putriana, "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid Muhajirin: Studi pada Masjid Muhajirin Desa Pelangki Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin," *Al-Dzahab* 4, no. 1 (March 7, 2023): 31–40, <https://doi.org/10.32939/dhb.v4i1.1539>.

	<p>b. Objek dalam penelitian ini yakni masjid-masjid yang ada di Kabupaten Kudus. Sedangkan Objek dalam penelitian Anisa Syafitri, Elyanti Rosmanidar, dan Marissa Putriana yakni Masjid Muhajirin Desa Pelangki Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin.</p>		
14.	<p>Sarwenda Biduri, Wiwit Hariyanto, dan Fittyhan Izza Noor Abidin (2023)</p>	<p>Digitalisasi Keuangan Menuju Akuntabilitas dan Transparansi Pada Masjid Al-Manar Sepanjang Kabupaten Sidoarjo⁹⁶</p>	<p>Mitra berperan aktif dan antusias dalam menerima solusi, pelatihan dan pendampingan yang diberikan oleh tim pengabdian masyarakat.</p>
<p>Persamaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Fokus penelitian yakni akuntabilitas dan transparansi b. Teknik pengambilan data diperoleh dengan cara observasi <p>Perbedaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jenis penelitian ini yakni kuantitatif. Sedangkan jenis penelitian Sarwenda Biduri, Wiwit Hariyanto, dan Fittyhan Izza Noor Abidin yakni menggunakan metode pendekatan pemecahan masalah dan partisipasi mitra. b. Objek dalam penelitian ini yakni masjid-masjid yang ada di Kabupaten Kudus. Sedangkan Objek dalam penelitian Sarwenda Biduri, Wiwit Hariyanto, dan Fittyhan Izza Noor Abidin yakni Masjid Al-Manar Sepanjang Kabupaten Kabupaten Sidoarjo. 			
15.	<p>Muhammad Kholid Adfi, Nurwani, dan Yenni Samri Juliati Nasution (2023)</p>	<p>Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Masjid Al-Ahsani Kecamatan Sunggal</p>	<p>Adanya sikap positif terhadap tanggung jawab yang diberikan kepada pengurus masjid dalam menjalankan kebijakan keuangan nirlaba (masjid). Transparansi terhadap pengelolaan keuangan masjid masih belum sepenuhnya diterapkan pada transparansi dalam</p>

⁹⁶ Biduri, Hariyanto, and Izza Noor Abidin, “Digitalisasi Keuangan Menuju Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Masjid Al-Manar Sepanjang Kabupaten Sidoarjo.”

		Kabupaten Deli Serdang ⁹⁷	pelaporan pengelolaan keuangan. Hanya saja transparansi yang di terapkan oleh masjid berupa pengumuman atas catatan laporan keuangan masjid setiap jum'at di umumkan secara langsung.
<p>Persamaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Teknik pengambilan data diperoleh dengan cara observasi Fokus penelitian yakni akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan masjid <p>Perbedaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Jenis penelitian ini yakni kuantitatif. Sedangkan jenis penelitian Muhammad Kholid Adfi, Nurwani, dan Yenni Samri Juliati Nasution yakni deskriptif kualitatif. Objek dalam penelitian ini yakni masjid-masjid yang ada di Kabupaten Kudus. Sedangkan Objek dalam penelitian Muhammad Kholid Adfi, Nurwani, dan Yenni Samri Juliati Nasution yakni Masjid Al-Ahsani Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. 			

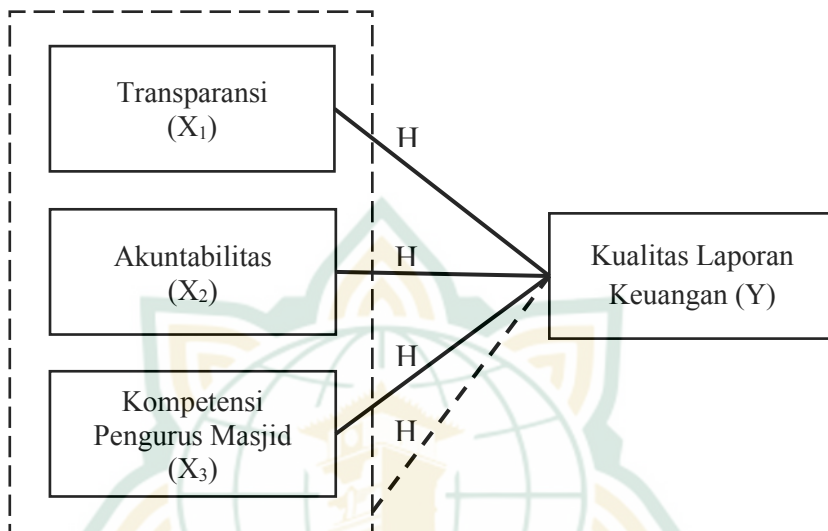
Sumber : Data Olahan (2023)

C. Kerangka Berfikir

Kualitas laporan keuangan menjadi isu penting dalam pengelolaan keuangan khususnya pada organisasi yang berorientasi nirlaba seperti masjid. Terutama dalam hal penyajian pelaporan keuangannya. Penelitian ini menggunakan empat variabel, yakni variabel bebas yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, dan kompetensi pengurus masjid, serta variabel terikat yakni kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, struktur penelitian disajikan dalam tabel berikut ini:

⁹⁷ Muhammad Kholid Adfi, Nurwani Nurwani, and Yenni Samri Juliati Nasution, "Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Masjid Al-Ahsani Kec. Sunggal Kab.Deli Serdang," *Jurnal Lentera Bisnis* 12, no. 3 (September 11, 2023): 884, <https://doi.org/10.34127/jrlab.v12i3.969>.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Keterangan :

- = Pengaruh secara parsial
- - - → = Pengaruh secara simultan

Berdasarkan kerangka berfikir di atas, dapat dilihat bahwa transparansi, akuntabilitas, dan kompetensi pengurus masjid mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada saat bersamaan. Hal tersebut konsisten dengan teori yang dijelaskan sebelumnya, bahwa kualitas laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh transparansi, akuntabilitas, dan kompetensi pengurus masjid.

D. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah peneliti yang diungkapkan sebagai frasa pertanyaan, hipotesis kerja memberikan respons yang berhasil terhadap pertanyaan penelitian. Respons ini dinilai bersifat sementara karena hanya berdasarkan teori yang berlaku dan belum teruji dengan data aktual. Oleh karena itu, hipotesis dapat dilihat sebagai solusi teoritis terhadap rumusan masalah penelitian daripada solusi empiris.⁹⁸ Sugiyono menjelaskan hipotesis adalah jawaban sementara atas rumusan masalah yang telah diuraikan dalam bentuk

⁹⁸ Lisnawati, "Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Kepercayaan Donatur," *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2023.

kalimat pertanyaan.⁹⁹ Hipotesis adalah jawaban teoritik yang dalam menyusunnya didasarkan pada teori-teori yang ada, sehingga menimbulkan kesimpulan yang memerlukan pengujian atas kebenarannya.¹⁰⁰ Untuk meneliti masalah yang diajukan oleh penulis, maka hipotesisnya sebagai berikut:

1. Pengaruh Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Masjid

Pandangan teori *stewardship* mengatakan hubungan dua pihak yakni prinsipal (pemilik) dan *steward* (manajer) dimana *steward* berperilaku sesuai dengan kepentingan prinsipal atau dapat dikatakan bahwa perlu adanya keterbukaan *steward* kepada prinsipal. Transparansi menyampaikan laporan kepada semua pihak secara terbuka, terkait pengoperasian atau pengelolaan dengan mengikutsertakan semua unsur sebagai landasan pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan.¹⁰¹ Membangun transparansi dalam pengelolaan keuangan lembaga nonlaba akan menciptakan sistem kontrol yang baik antara dua pihak yaitu lembaga dan *stakeholders*. Karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi tetapi juga kepada pihak ekstern yaitu donatur atau masyarakat luas.¹⁰² Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Oktavianto Ganda Nugraha (2020) mengungkapkan bahwa transparansi keuangan masjid berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepercayaan jamaah.¹⁰³ Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Nabiilah Ayu Nirmala Pinaremas dan Ec. Muslimin (2022) menyatakan bahwa transparansi keuangan masjid berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepercayaan jamaah.¹⁰⁴ Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lisnawati (2023) mendapatkan hasil bahwa transparansi

⁹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014).

¹⁰⁰ Urip Santoso, *Menyusun Proposal Penelitian*, 1 sd ed (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015).

¹⁰¹ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat*, Cetakan 1 (Yogyakarta: Idea Press, 2011).

¹⁰² Lisnawati, "Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Kepercayaan Donatur."

¹⁰³ Oktavianto Ganda Nugraha, "Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Masjid Al Falah Surabaya Terhadap Tingkat Kepercayaan Jamaah," *Universitas Airlangga*, 2020.

¹⁰⁴ Pinaremas and Muslimin, "Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Masjid Aulia Rohman Tuban Terhadap Tingkat Kepercayaan Jamaah."

berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan donatur.¹⁰⁵ Jamaah masjid akan percaya apabila laporan keuangan masjid yang dihasilkan berkualitas sesuai standar yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H1 : Transparansi Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Masjid

2. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Masjid

Pandangan teori *stewardship* mengatakan hubungan dua pihak yakni prinsipal (pemilik) dan *steward* (manajer) dimana *steward* berperilaku sesuai dengan kepentingan prinsipal atau dapat dikatakan bahwa perlu adanya pertanggung jawaban *steward* kepada prinsipal. Pihak prinsipal akan mendelegasikan tanggung jawab pengambilan keputusan kepada *steward*. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang mempunyai hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban. Maka dari itu, semua instansi, pemerintah, badan dan lembaga negara baik pusat maupun daerah harus memahami lingkup akuntabilitasnya sesuai pokok masing-masing.¹⁰⁶ Berdasarkan penelitian Ismet Ismatullah dan Tina Kartini (2018) mendapatkan hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pemberdayaan ekonomi umat.¹⁰⁷ Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Oktavianto Ganda Nugraha (2020) mengungkapkan bahwa akuntabilitas keuangan masjid berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepercayaan jamaah.¹⁰⁸ Hal itu juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nabiilah Ayu Nirmala Pinaremas dan Ec. Muslimin (2022) hasil penelitiannya menyatakan bahwa akuntabilitas keuangan masjid berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepercayaan jamaah.¹⁰⁹ Jamaah masjid akan percaya apabila laporan keuangan masjid

¹⁰⁵ Lisnawati, “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Kepercayaan Donatur.”

¹⁰⁶ Lisnawati.

¹⁰⁷ Ismatullah and Kartini, “Transparansi dan Akuntabilitas Dana Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat.”

¹⁰⁸ Nugraha, “Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Masjid Al Falah Surabaya Terhadap Tingkat Kepercayaan Jamaah.”

¹⁰⁹ Pinaremas and Muslimin, “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Masjid Aulia Rohman Tuban Terhadap Tingkat Kepercayaan Jamaah.”

yang dihasilkan berkualitas sesuai standar yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H2 : Akuntabilitas Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Masjid

3. Pengaruh Kompetensi Pengurus Masjid Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Masjid

Pandangan teori *stewardship* mengatakan hubungan dua pihak yakni prinsipal (pemilik) dan *steward* (manajer) dimana *steward* berperilaku sesuai dengan kepentingan prinsipal, dimana agar *steward* ingin mendapatkan hasil yang diharapkan memerlukan yang namanya kompetensi. Kompetensi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas. Untuk meningkatkan akuntabilitas diperlukan adanya kompetensi. Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menghadapi situasi dan keadaan di dalam pekerjaannya. Kompetensi seseorang dapat dilihat dari tingkat kreativitas yang dimilikinya serta inovasi-inovasi yang diciptakan dan kemampuannya dalam menyelesaikan suatu masalah. Berdasarkan penelitian Syamsu Alam dan Roslina Alam (2019) mendapatkan hasil bahwa kompetensi pengelola keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid.¹¹⁰ Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Fachri Chusaini Abdillah (2019) mengungkapkan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengurus remaja masjid.¹¹¹ Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian Tri Puriyanti dan Hasan Mukhibad (2020) hasil penelitiannya menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan masjid.¹¹² Berdasarkan hal tersebut, hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H3 : Kompetensi Pengurus Masjid Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Masjid

4. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Kompetensi Pengurus Masjid Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Masjid

¹¹⁰ Alam and Alam, “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Butuh Komitmen dan Kompetensi Pengelola.”

¹¹¹ Fachri Chusaini Abdillah, “Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Pengurus Remaja Masjid Tholabuddin Rungkut Surabaya,” *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2019.

¹¹² Puriyanti and Mukhibad, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Masjid.”

Informasi dapat segera dan mudah dipahami oleh pengguna tergantung pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.¹¹³ Karakteristik kualitatif laporan keuangan ada empat, yakni dapat dipahami, relevan, andal dan dapat dibandingkan.¹¹⁴ Kualitas laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti transparansi, akuntabilitas, kompetensi sumber daya manusia, dan kesesuaian dengan standar akuntansi. Berdasarkan penelitian Ismet Ismatullah dan Tina Kartini (2018) mendapatkan hasil bahwa secara simultan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi umat.¹¹⁵ Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Agustina Isviandari, Nur Diana, M. Cholid Mawardi (2019) hasil penelitiannya menyatakan bahwa secara simultan penerapan standar akuntansi, pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.¹¹⁶ Hal itu juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktavianto Ganda Nugraha (2020) mengungkapkan bahwa secara simultan transparansi dan akuntabilitas keuangan masjid berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan jamaah.¹¹⁷ Berdasarkan hal tersebut, hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H4 : Transparansi, Akuntabilitas, dan Kompetensi Pengurus Masjid Secara Simultan Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Masjid

¹¹³ Puriyanti and Mukhibad.

¹¹⁴ Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Keuangan Akuntansi Syariah*.

¹¹⁵ Ismatullah and Kartini, “Transparansi dan Akuntabilitas Dana Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat.”

¹¹⁶ Isviandari, Diana, and Mawardi, “Pengaruh Penerapan PSAK 45 Tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba, Penerapan PSAK 109, Pengendalian Internal Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Masjid-Masjid Di Kota Batu.”

¹¹⁷ Nugraha, “Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Masjid Al Falah Surabaya Terhadap Tingkat Kepercayaan Jamaah.”